

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kabupaten /kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna , bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan prasyarat bagi pemerintahan yang baik. Dalam rangka pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang akuntabel maka diterbitkanlah Tap MPR RI No. XI/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, serta Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh sebab itu Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Perencanaan Strategis yang dirumuskan sebelumnya dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden melalui Menteri PAN dan salinannya kepada Mendagri dan Kepala Bappenas dengan menggunakan pedoman penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 tahun 2014).

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus

mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2015 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kabupaten Demak Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran Kabupaten Demak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2011-2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang ;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Demak Tahun 2015 ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban dan juga sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan yang akan diambil, maka tujuan disusunnya laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) ini adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Demak sebagai salah satu upaya untuk melahirkan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna,

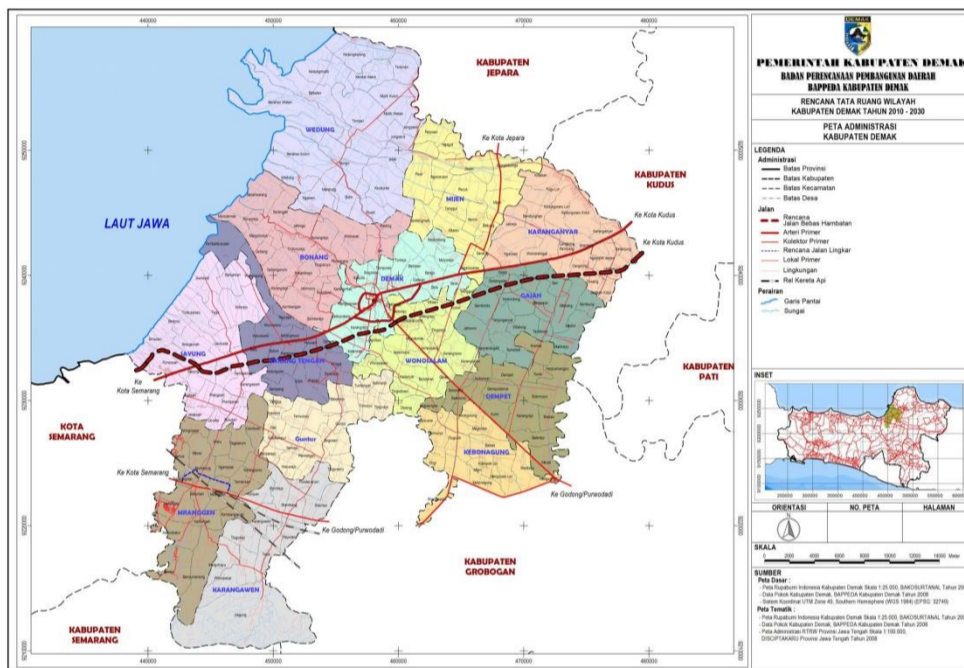
bersih dan bertanggungjawab, disamping juga dapat digunakan untuk menginformasikan keberhasilan/kegagalan, sehingga dapat belajar dari keberhasilan/kegagalan dan juga dapat menghargai keberhasilan tersebut.

## D. GAMBARAN UMUM KABUPATEN DEMAK

### 1. LETAK DAN KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Demak sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah terletak antara 6°43'26" - 7°09'43" Lintang Selatan dan 110° 27'58" - 110°48'47" Bujur Timur.

Gambar 1.1  
Peta Administrasi Kabupaten Demak Skala 1 : 6000



Sumber : Data BAPPEDA Tahun 2015

Secara administratif sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah sepanjang 49 km dan dari utara ke selatan sepanjang 41 km (Gambar 1.1).

**Tabel 1.1**  
**Pembagian Tinggi Wilayah dari Permukaan Laut**  
**Di Kabupaten Demak Tahun 2015**

1. Region A	:	Elevasi 0 – 3 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Bonang, Demak, Karangtengah, Mijen, Sayung dan Wedung
2. Region B	:	Elevasi 3 – 10 meter, meliputi sebagian besar dari tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Demak Elevasi 10 – 25 meter. Meliputi sebagian besar dari Kecamatan Dempet, Karangawen dan Mranggen Elevasi 25 – 100 meter meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Mranggen dan Karangawen
3. Region C	:	Elevasi lebih dari 100 meter meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Karangawen dan Mranggen

Sumber: Profil Kabupaten Demak 2015

## 2. WILAYAH ADMINISTRASI

Luas wilayahnya sebesar 89.743 ha. Sebagai daerah agraris, sebagian besar wilayah kabupaten Demak terdiri dari atas lahan sawah yang mencapai 51.558 ha, dan selebihnya adalah lahan kering .

**Tabel 1.2**  
**Luas Lahan dan Persentasenya**  
**Di Kabupaten Demak Tahun 2015**

NO	Jenis Lahan	Luas Lahan	Persentase
1.	Lahan Sawah		
	1.1 Irigsi	33.426	37,26
	1.2 Tadah Hujan	17.347	20,19
	1.3 Sementara Tidak Diusahakan	-	-
	1.4 Lainnya	-	-
2.	Lahan Kering		
	2.1 Tegall/ kebun	13.402	15.72
	2.2 Ladang	-	-
	2.3 Tambak/ Empang/ Hutan Negara	9.537	11,53
	2.4 Sementara Tidak Diusahakan	39	0,05
	2.5 Perkebunan Negara	454	0,39
	2.6 Hutan Rakyat	172	0,67

LKjIP Kabupaten Demak 2015

2.7 Lainnya	15.366	15,72
Jumlah / Total	89.743	100,00

Sumber: Profil Kabupaten Demak 2015

Sebagian besar sawah yang dipergunakan berpengairan teknis seluas 37,26 %, dan tadah hujan seluas 20,19 %. Sedangkan 14,19 % lahan untuk tegal/kebun, 15,72 % digunakan untuk bangunan dan halaman; 11,53 % untuk tambak,

Kabupaten Demak terbagi atas 14 Kecamatan, 243 Desa, dan 6 Kelurahan.

Luas Wilayah Kabupaten Demak tercatat sebesar 89.743 hektar dan secara administratif terbagi menjadi 14 Kecamatan yang terdiri dari 6 Kelurahan dan 243 Desa (Tabel 1.3).

**Tabel 1.3**  
**Banyaknya Desa/Kelurahan di Kabupaten Demak**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)	%
	Mranggen	19	-	7.222	8,05
	Karangawen	12	-	6.695	7,46
	Guntur	20	-	5.753	6,41
	Sayung	20	-	7.869	8,77
	Karangtengah	17	-	5.155	5,74
	Bonang	21	-	8.324	9,28
	Demak	13	6	6.113	6,81
	Wonosalam	21	-	5.788	6,45
	Dempet	16	-	6.161	6,87
	Gajah	18	-	4.783	5,33
	Karangnayar	17	-	6.776	7,55
	Mijen	15	-	5.029	5,60
	Wedung	20	-	9.876	11,00
	Kebonagung	14	-	4.199	4,68
	<b>Jumlah</b>	<b>243</b>	<b>6</b>	<b>89.743</b>	<b>100</b>

Sumber data : Profil Kabupaten Demak 2015

### 3. KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk Kabupaten Demak berdasarkan data dari Dindikcapil kab. Demak per Desember 2015 tercatat sebanyak 1.100.064 orang, terdiri dari 555.146 (50,46 %) laki-laki dan 544.918 (49,54 %) perempuan.

Menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk Kabupaten Demak termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 749.416 orang (67,74 %) dan selebihnya 297.063 orang (28,85 %) berusia 15 tahun dan 59.849 orang (5,41 %) berusia 65 tahun ke atas

Sebagai akibat dari struktur penduduk yang demikian besarnya angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Demak adalah 47,63. Hal ini berarti bahwa setiap 100 orang produktif menanggung sekitar 47 orang penduduk usia non produktif yaitu mereka yang berusia dibawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas.

Dilihat dari kepadatan penduduk, pada tahun 2015 kepadatan penduduk Kabupaten Demak mencapai 1.233 orang/km<sup>2</sup>. Penduduk terpadat di Kecamatan Mranggen dengan kepadatan 2.432 orang/km<sup>2</sup>, sedang penduduk paling jarang berada di Kecamatan Wedung dengan kepadatan hanya 736 orang/km<sup>2</sup>.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) bisa dilihat dari kualitas pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka akan semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Berdasarkan data dari Profil Kabupaten Demak 2015, pada tahun 2014 terdapat 509 Sekolah Dasar, 89 SLTP, dan 96 SLTA dan Perguruan tinggi 1 buah.

Jumlah penduduk Usia sekolah 7-24 tahun yang pada tahun 2014 masih bersekolah sebanyak : SD 95.101 orang SLTP 25.881 orang dan SLTA 24.920 orang. Sedangkan jumlah guru sebanyak 5.686 orang untuk guru SD, 1.702, guru SLTP dan 2.188 guru SLTA.

### 4. KESEHATAN

Kondisi bidang kesehatan di Kabupaten Demak di antaranya dapat dilihat dari sarana medis dan tenaga medis serta capaian pembangunan bidang kesehatan. Pada Tahun 2014 jumlah rumah sakit yang ada sebanyak 3 buah terdiri dari RSUD 1 tipe C dan swasta 2 buah, Puskesmas 27 buah dan didukung oleh 53 Puskesmas pembantuan 44 Klinik dengan jumlah

tenaga kesehatan dokter spesialis 49 orang, dokter umum 76 orang , dokter gigi 15 orang, apoteker 11 orang, 31 sarjana kesehatan, 672 perawat, 32 perawat khusus gigi, dan 487 bidan.

Peserta Keluarga Berencana (KB) aktif di Kabupaten Demak selama tahun 2014 tercatat 215.436 peserta. Berdasarkan alat kontrasepsi yang digunakan sebagian besar peserta KB aktif menggunakan suntik sebagai metode kontrasepsi (69,56%). Selain itu ada beberapa alat kontrasepsi yang diminati oleh peserta KB dari pada alat yang lain, antara lain susuk/implant (9,79%), pil (9,86 %) dan IUD (4,59 %) sedangkan kondom, MOW dan MOP merupakan alat kontrasepsi yang tidak banyak diminati oleh para peserta KB.

## 5. PEREKONOMIAN

Menurut mata pencarian penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkerja pada tahun 2014 sebanyak 523.462 orang, yang terdiri atas 310.353 laki-laki dan 213.109 perempuan dirinci menurut lapangan usahanya yang tersebar pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air, konstruksi, perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan, jasa dan lainnya. Data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak banyaknya pencari kerja yang mendaftar selama tahun 2014 adalah sebanyak 6.321 orang terdiri dari 2.625 orang laki-laki (41,53 %) dan 3.696 orang perempuan (58,47%).

Mayoritas penduduk Kabupaten Demak beragama Islam dengan jumlah : 1.090.848 penduduk. Agama : Kristen 6.831 penduduk, Katolik : 2.513 penduduk, Hindu : 75 penduduk dan Budha : 149 penduduk dan 45 lainnya.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Demak dari hasil perhitungan kinerja ekonomi Kabupaten Demak pada tahun 2013 meningkat dibanding tahun 2012 yaitu dari 4,46 persen menjadi 5,27 persen pada tahun 2013 dimana semua sektor ekonomi mengalami peningkatan (tumbuh positif),sedangkan tahun 2014 pertumbuhan ekonomi 4,27 persen, sedikit menurun jika di bandingkan tahun 2013.

Pada tahun 2015 kabupaten Demak memperoleh alokasi anggaran untuk Tugas pembantuan berasal dari 4 ( empat ) Kementerian terinci dalam 4 ( empat ) DIPA dengan alokasi dana sebesar Rp. 24.798.004.000. Adapun

SKPD yang menerima dana tersebut adalah Dipertan, Dinsosnakertrans, Dinlutkan, dan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil.

PDRB Kabupaten Demak atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 PDRB Kabupaten Demak sebesar Rp 15.525.369,24. dan tahun 2014 sebesar RP.17.116.938,70 dan untuk tahun 2015 masih menggunakan data tahun 2014.

Sedang untuk PDRB atas dasar harga konstan 2013 sebesar 13.499.226,47 mengalami kenaikan menjadi 14.075.691,75 pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 masih menggunakan data tahun 2014 sebesar 14.075.691,75.

**Tabel 1.4**  
**Beberapa Indikator Sosial Ekonomi Makro**  
**Kabupaten Demak 2011 – 2014**

NO	URAIAN	SATUAN	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,39	4.46	5,27	4,27
2	Inflasi	%	3.49	4.10	8.22	8,69
3	PDRB Berlaku	Jutaan Rupiah	12.900.563,22	14.203.562,06	15.525.369,24	17.116.938,70
4	PDRB Konstan	Jutaan Rupiah	12.275.702,69	12.823.227,04	13.499.226,47	14.075.691,75
5	PDRB per Kapita	Rupiah	12.053.469	13.121.413	14.185.259	15.471.848
6	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.070.278	1.082.472	1.094.472	1.106.328
7	Pertumbuhan Penduduk	%	1.18	1.14	1.11	1,08
8	Penduduk Miskin	000 Orang (%)	188.5(17.61)	181.1(16.73)	172.0(15.72)	163.3 ( 14.76)
9	IPM		66.84	67.55	68.38	68.95
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.03	8.40	7.08	5,17
11	Pengangguran Terbuka	Jiwa	26.719	46.523	38.654	28.552
12	Tingkat Partisipasi Ang. Kerja	%	68.27	70.13	68.11	67,86
13	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,09	75,12	75,16	75,18
14	Nilai Tukar Petani		102.13	103.22	103.32	103.14
15	Produksi Padi	Ton	591.736	604.020	607.988	567.745
16	Dependency Ratio		48.87	48.45	48.02	47,63

Sumber : Data BAPPEDA Tahun 2015



Sementara itu selama kurun waktu dua tahun tersebut PDRB perkapita atas dasar harga berlaku juga mengalami kenaikan dari 13.121.227,04. pada tahun 2012 menjadi 14.185.226,47 pada tahun 2013 dan tahun 2014 sebesar 15.471.691,75.

## **E. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN SARPRAS**

### **1. Susunan Kepegawaian**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, LKjIP disusun setahun sekali pada saat setelah tahun anggaran berakhir. Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka LKjIP Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2015 ini merupakan kajian dan analisis pencapaian kinerja program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dengan susunan organisasi perangkat daerah , yakni :

#### **A. Sekretariat Daerah, terdiri dari :**

- 1.1. Asisten Pemerintahan, koordinator dari :
  - 1.1.1. Bagian Pemerintahan Umum;
  - 1.1.2. Bagian Hukum;
  - 1.1.3. Bagian Hubungan Masyarakat.
- 1.2. Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan rakyat, koordinator dari :
  - 1.2.1. Bagian Perekonomian;
  - 1.2.2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - 1.2.3. Bagian Pembangunan.
- 1.3. Asisten Administrasi, koordinator dari :
  - 1.3.1. Bagian Keuangan;
  - 1.3.2. Bagian Umum;
  - 1.3.3. Bagian Organisasi dan Kepegawaian.
- 1.4 Staf Ahli Bupati terdiri dari :
  - 1.4.1 Staf ahli Bidang Hukum dan politik;
  - 1.4.2 Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
  - 1.4.3 Staf Ahli Bidang Pembangunan;
  - 1.4.4 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;

1.4.5 Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

**B. Sekretariat Dewan ;**

**C. Dinas Daerah, terdiri dari :**

1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
7. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Dinas Pertanian;
10. Dinas Kelautan dan Perikanan;
11. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

**D. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari;**

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
5. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Inspektorat;
8. Kantor pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan;
9. Kantor Lingkungan Hidup;
10. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
12. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
13. Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Rumah Sakit Daerah Sunan Kalijaga

**E. Kecamatan, terdiri dari :**

1. Demak,
2. Wonosalam,
3. Dempet,
4. Bonang,
5. Wedung,
6. Mijen,
7. Gajah,
8. Karanganyar,
9. Guntur,
10. Karangawen,
11. Mranggen,
12. Sayung,
13. Karangtengah,
14. Kebonagung.

Perlu kami sampaikan bahwa jumlah kebutuhan pegawai di Kabupaten Demak sebanyak 13.160 pegawai jumlah pegawai yang ada saat ini adalah 8.505 pegawai jadi masih kekurangan 4.655. Untuk mengisi SKPD se Kabupaten Demak.

**2. Sarana dan Prasarana**

Pemerintah Kabupaten Demak sampai dengan akhir tahun 2015 mempunyai nilai buka aset tetap sebesar Rp. 2,419,485,215,733,08 yang terdiri dari tanah senilai Rp. 257,303,751,417,00 yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Demak, Peralatan dan mesin senilai Rp. 346,031,794,862,59 yang berada di seluruh instansi /SKPD, Gedung dan bangunan senilai Rp. 744,141,098,340,52 yang berupa gedung-gedung perkantoran, sekolah dan sarana prasarana umum lainnya. Sedangkan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 2,010,909,214,329,00. Untuk aset tetap lainnya senilai Rp. 46,218,796,664,41 dan konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp. 29,327,147,498,00. Daftar realisasi aset tetap daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.5**  
**REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH**  
**PER 31 DESEMBER 2015**  
**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

No.	URAIAN	2015	2014
1	2	3	4
1.	TANAH	257,303,751,417,00	249,861,227,417,00
2.	PERALATAN DAN MESIN	346,031,794,862,59	275,690,284,061,76
3.	GEDUNG DAN BANGUNAN	744,141,098,340,52	668,382,452,231,67
4.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2,010,909,214,329,00	1,638,665,971,603,00
5.	ASET TETAP LAINNYA	46,218,796,664,41	44,050,551,842,41
6.	KONSTRUKSI DLM Pengerjaan	29,327,147,498,00	947,604,200,00
7.	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET	(1,008,446,587,378,45)	(793,470,488,929,00)
	<b>NILAI BUKA ASET TETAP</b>	<b>2,419,485,215,733,08</b>	<b>2,084,127,602,426,74</b>

Sumber : Dari DPKKD kab. Demak

## F. ISU STRATEGIS

Beberapa permasalahan/ isu strategis dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Demak tahun 2015 adalah :

### 1. Pengurangan kemiskinan

Isu kemiskinan hingga saat ini masih tetap menjadi isu yang belum teratasi hingga tuntas. Secara historis bahwa akar kemiskinan terletak dalam hubungan kekuasaan yang terbentuk dari cara produksi-konsumsi manusia terhadap sumber daya strategis. Selain itu kemiskinan merupakan salah satu pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan.

2. Pengurangan pengangguran.

Penanganan pengangguran di Kabupaten Demak di fokuskan pada upaya perluasan kesempatan kerja, dan lapangan usaha, Peningkatan calon tenaga kerja melalui peningkatan sarana prasarana dan pengelolaan balai latihan kerja, pendidikan yang berorientasi pada pasar kerja, pengembangan wirausaha baru dan ektor UMKM berbasis sumber daya local. Selain itu juga peningkatan investasi di daerah baik PMDN maupun PMA. akan membuka lapangan kerja baru sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran dan mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.

3. Infrastruktur Ekonomi- social

Peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi pasar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah serta mendorong produksi dan distribusi komoditas ekonomi. Dan juga peningkatan infrastruktur social seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, serta prasarana social lainnya yang melibatkan partisipasi masyarakat dan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat.

4. Ketahanan Pangan- Ekonomi kerakyatan

Kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya local yaitu pertanian, kelautan, UMKM dan pariwisata perlu ditingkatkan kinerjanya agar dapat berperan lebih baik dalam menopang ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi.

5. Pembangunan Pedesaan- kawasan strategis

Dalam rangka mengurangi kesenjangan pertumbuhan desa- kota dan meningkatnya keberdayaan masyarakat desa perlu dipercepat pembangunan pedesaan dan pelayanan desa.

6. Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi.

Pemerintahan yang bersih dan baik menjadi isu yang terjadi baik tingkat nasional, provinsi serta kabupaten Demak. sebagai salah satu upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta memberikan penyelenggaraan pemerintah yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka tata kelola pemerintahan yang bersih, baik menjadi syarat yang



utama. Reformasi Birokrasi sebagai bagian yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kabupaten Demak perlu mengantisipasi dengan melakukan langkah –langkah utama terkait dengan pematapan system manajemen kepegawaian melalui perencanaan dan pengembangan karir.

Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam mewujudkan demokrasi yang baik.